

SKRIPSI
STRATEGI PENENTUAN PUSAT-PUSAT KEGIATAN PKL YANG
RAMAH LINGKUNGAN DI KECAMATAN PATTALLASSANG
KABUPATEN TAKALAR

Disusun dan diajukan oleh

NUR JAYADI
D101181011



DEPARTEMEN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

LEMBAR PENGESAHAN (TUGAS AKHIR)

**STRATEGI PENENTUAN PUSAT-PUSAT KEGIATAN PKL YANG
RAMAH LINGKUNGAN DI KECAMATAN PATTALLASSANG
KABUPATEN TAKALAR**

Disusun dan diajukan oleh

NUR JAYADI

D101181011

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Perencanaan Wilayah dan

Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 12 Juli 2022

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Ir. Arifuddin Akil, MT
NIP. 19630504 199512 1 001

Ir. Mukti Ali, ST., MT., Ph.D
NIP. 19741211 200501 1 001

Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin



Dr. Eng. Abdul Bachman Basyid, ST., M.Si
NIP. 19741006 200812 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Jayadi
NIM : D101181011
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

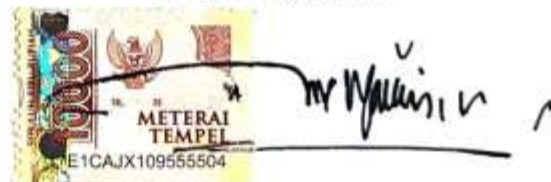
Strategi Penentuan Pusat-Pusat Kegiatan PKL yang Ramah Lingkungan di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar

Benar adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 12 Juli 2022

Yang Menyatakan



(Nur Jayadi)

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah proses penyusunan skripsi yang berjudul **Strategi Penentuan Pusat-Pusat Kegiatan PKL yang Ramah Lingkungan di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar** ini dapat diselesaikan. Skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi di Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin.

Kecamatan Pattallassang sebagai pusat administrasi dan bisnis Kabupaten Takalar terus mengalami perkembangan yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi eksisting di beberapa sektor terutama sektor informal seperti Pedagang Kaki Lima (PKL). Kehadiran PKL sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi citra perkotaan dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib. Keadaan tersebut memicu adanya kondisi yang tidak ramah lingkungan terhadap aktivitas PKL di Kecamatan tersebut. Penulis meninjau, sektor informal seperti PKL perlu mendapatkan perhatian dari sisi penataan ruang untuk mewujudkan pemanfaatan ruang secara maksimal di kecamatan tersebut.

Skripsi ini bertujuan menyusun strategi penentuan pusat-pusat kegiatan PKL yang ramah lingkungan di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar yang ditinjau dari karakteristik PKL, daya tampung dan daya dukung lahan serta faktor internal dan faktor eksternal dalam menentukan pusat-pusat kegiatan PKL. Penulis menyadari, pembangunan kota berkelanjutan sangat memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup sehingga penerapan konsep ramah lingkungan menjadi hal utama untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan tersebut. Oleh karena itu, penulis berusaha mencari konsep yang tepat dan sesuai untuk diaplikasikan dalam menyikapi kondisi PKL yang belum ramah lingkungan.

Adapun skripsi ini berisi latar belakang, tinjauan Pustaka, metode penelitian, gambaran umum, hasil/pembahasan dan kesimpulan/rekomendasi lanjutan. Penulis berharap skripsi ini dapat dijadikan bahan tindak lanjut yang kemudian dapat menjadi bahan pembelajaran untuk disiplin ilmu yang ditempuh. Bagi pemerintah dan instansi terkait, Skripsi ini diharapkan menjadi masukan terhadap penyusunan

kebijakan dan rencana strategis pemerintah dalam upaya peningkatan sektor-sektor ekonomi, khususnya sektor ekonomi informal.

Penulis menyadari, terdapat kekurangan yang menyebabkan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Olehnya, penulis sangat mengharapkan adanya koreksi, masukan dan tindak lanjut dari seluruh pihak untuk penyempurnaan skripsi ini.

Makassar, 12 Juli 2022

(Nur Jayadi)

Sitasi dan Alamat Kontak:

Jayadi, Nur. 2022. Strategi Penentuan Pusat-Pusat Kegiatan PKL yang Ramah Lingkungan di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar. Skripsi Sarjana, Prodi S1 PWK Universitas Hasanuddin. Makassar.

Demi Peningkatan Kualitas Skripsi ini, kritik dan saran dapat dikirimkan ke penulis melalui alamat email berikut ini: andinurjayadi@gmail.com

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah rabbilalamin, segala puji dan besarnya rasa syukur penulis Puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmat dan izin-Nyalah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan yang dengannya ilmu telah tersampaikan kepada seluruh umat manusia tidak terkecuali bagi penulis. Selesaiannya tugas akhir ini tidak terlepas dari kontribusi dari berbagai pihak. Olehnya itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Muh. Ridwan Abdullah dan Saddiyah atas doa, dukungan dan kasih sayang yang diberikan selama ini. Serta kepada saudara terkasih Jadwalina Masthuri dan keluarga, Muh. Safri Ali Firdaus dan keluarga, Nurkurnaeni dan Keluarga, Muh. Ashar Farid dan Haerul Akbar atas doa, dukungan, kasih sayang, dan motivasi yang diberikan selama proses penyelesaian tugas akhir ini;
2. Rektor Universitas Hasanuddin (Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc) atas dukungan dan bantuannya;
3. Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (Bapak Prof. Dr. Eng. Muhammad Isran Ramli, ST., MT) atas dukungan dan bantuannya;
4. Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (Bapak Dr. Eng. Abdul Rachman Rasyid, ST., M.Si) atas dukungan dan bimbingannya selama penulis menempuh pendidikan;
5. Sekretaris Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (Ibu Sri Aliah Ekawati, ST., MT) atas waktu, ilmu, dan nasihatnya;
6. Dosen Penasehat Akademik (Alm. Bapak Ir. M. Fathien Azmy, M.Si) atas nasihat, dukungan, dan ilmu selama penulis menempuh pendidikan;
7. Dosen Pembimbing Utama (Bapak Dr. Ir. Arifuddin Akil, MT) atas ilmu, waktu, kesabaran, keikhlasan, bimbingan dan dukungan yang diberikan;
8. Dosen Pembimbing Pendamping (Bapak Ir. Mukti Ali, ST., MT., Ph.D) atas ilmu, waktu, kesabaran, keikhlasan, bimbingan dan dukungan yang diberikan;

9. Dosen Penguji I (Ibu Sri Aliah Ekawati, ST., MT) atas ilmu, waktu, nasihat, bimbingan dan saran yang diberikan;
10. Dosen Penguji II (Bapak Laode Muh. Asfan Mujahid, ST., MT) atas ilmu, waktu, nasihat, bimbingan dan saran yang diberikan;
11. Kepala Studio Akhir (Ibu Dr.techn. Yashinta K. D. Sutopo, ST., MIP) atas kasih sayang, motivasi, bimbingan, dan saran yang diberikan;
12. Seluruh Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberi ilmu kepada penulis dari awal perkuliahan hingga penulis menyelesaikan masa perkuliahan;
13. Seluruh civitas akademik Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis mengurus administrasi selama perkuliahan;
14. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Takalar (Ibu Nasrah, S.Sos., M.Si) selaku Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan UKM, atas kesediaan waktu, bantuan, informasi dan izin yang diberikan dalam melakukan penelitian ini;
15. Perusahaan Daerah Panrannuangku Kabupaten Takalar (Bapak Ruslan Rauf dan Ibu Ervina) selaku Kepala Divisi UMKM & Perdagangan dan Staf Umum & SDM, atas kesediaan waktu, bantuan, informasi dan izin yang diberikan dalam melakukan penelitian ini;
16. Bapak Muhammad Syarif, S.Pi selaku Camat Pattallassang Kabupaten Takalar, atas kesediaan waktu, bantuan, informasi dan izin yang diberikan dalam melakukan penelitian ini;
17. Bapak Tamsil Linrung selaku Senator DPR-RI Periode 2004-2019 dan DPD-RI Periode 2019-2024 yang telah memberikan bantuan beasiswa dan pendampingan selama proses kuliah berlangsung;
18. Bapak Muhtar, SH., MH, dan Lina M. Komaruddin S.Psi selaku Dewan Pembina Formasita yang telah memberikan bimbingan, informasi, pengalaman, ilmu dan pendampingan selama proses kuliah berlangsung;
19. Para pengurus Tali Fondation yang telah memberikan dukungan dan pengalaman selama proses kuliah berlangsung;

20. Teman-teman seperjuangan LBE *Urban Planning and Design*, Mahasiswa PWK FT-UH angkatan 2018, Keluarga besar PWK FT-UH dan STA TIM 10 atas ilmu, pengalaman, keceriaan, dukungan, bantuan dan kebersamaan hingga saat ini;
21. Sahabat-sahabat terkasih FORMASITA, FGTS III dan FGTI atas kebersamaan, canda tawa, dukungan dan motivasi yang telah diberikan;
22. Saudara Muhammad Edwin Ilyas, atas kebersamaan, waktu, keceriaan, dukungan dan bantuan yang diberikan;
23. Muhammad Dzulfadhli, Muhammad Dzulkhair Jufri, Rivaldi Ibrahim, Andika, Ilham Fathul Kiram dan Yasma atas kebersamaan, waktu, dukungan dan bantuan yang diberikan;
24. Kelompok Pengamanan (*Security*) dan *cleaning service* Fakultas Teknik Unhas yang selalu menjadi tempat apa adanya, tempat makan, tempat mendengarkan pengalaman dan tempat bercanda ria; dan
25. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah membantu dan mendukung penulis untuk menyelesaikan tugas akhir pada jenjang S1 Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Hasanuddin.

Semoga Allah Subhana Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat atas amalan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Aamiin ya Rabbal 'alamin.

Makassar, 12 Juli 2022

(Nur Jayadi)

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR RUMUS	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pertanyaan Penelitian.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	4
1.5.1 Lingkup Substansi	4
1.5.2 Lingkup Lokasi.....	5
1.6 Produk Penelitian.....	5
1.7 Dampak Penelitian.....	5
1.8 Sistematika Penulisan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Kajian NSPK.....	7

2.1.1 Kebijakan/Undang-Undang Terkait.....	7
2.1.2 Sektor Informal.....	9
2.1.3 Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL)	10
2.1.4 Karakteristik PKL.....	11
2.1.5 Teori Lokasi terkait penataan PKL di Perkotaan.....	13
2.1.6 Ramah Lingkungan.....	14
2.2 Studi Banding.....	17
2.2.1 Orcard <i>Road</i> , Singapura.....	17
2.2.2 Kawasan Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	18
2.3 Penelitian Terdahulu	19
2.4 Kerangka Pikir Penelitian	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Waktu dan Wilayah Penelitian.....	33
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	36
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.3.1 Data Primer	36
3.3.2 Data Sekunder	41
3.4 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	41
3.5 Teknik Analisis Data.....	42
3.5.1 Tujuan Penelitian Pertama	42
3.5.2 Tujuan Penelitian Kedua.....	43
3.5.3 Tujuan Penelitian Ketiga	44
3.6 Definisi Operasional.....	48
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	49
4.1 Wilayah Kabupaten Takalar.....	49

4.1.1 Geografis dan Administratif	49
4.1.2 Curah Hujan.....	51
4.1.3 Kependudukan	51
4.1.4 Kondisi Sosial dan Ekonomi	52
4.1.5 Jaringan Sarana dan Prasarana Wilayah	52
4.2 Wilayah Kecamatan Pattallassang	53
4.2.1 Geografis dan Administratif	53
4.2.2 Curah Hujan.....	56
4.2.3 Kependudukan	56
4.2.4 Kondisi Sosial dan Ekonomi	57
4.2.5 Jaringan Sarana dan Prasarana Wilayah	58
BAB V PEMBAHASAN	62
5.1 Karakteristik PKL di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar.....	62
5.1.1 Kondisi PKL	62
5.1.2 Pola Penyebaran PKL.....	72
5.1.2 Pola Aktivitas PKL.....	79
5.2 Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan untuk Penataan Kualitas PKL yang Ramah Lingkungan di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar	85
5.2.1 Daya Dukung Lahan.....	85
5.2.2 Daya Tampung Lahan.....	104
5.3 Arahan penentuan Pusat-Pusat Kegiatan PKL yang Ramah Lingkungan di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar	107
BAB VI PENUTUP	145
6.1 Kesimpulan.....	145
6.2 Saran	146
DAFTAR PUSTAKA	147

LAMPIRAN.....	153
CURRICULUM VITAE.....	165

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Tipologi karakter fisik modul PKL	12
Gambar 2.2	Pusat Jajanan untuk Memfasilitasi PKL di Singapura.....	17
Gambar 2.3	Suasana Pengunjung dan PKL di Teras Malioboro 1.....	18
Gambar 2.4	Kerangka Pikir Penelitian.....	32
Gambar 3.1	Peta Orientasi Wilayah Penelitian	34
Gambar 3.2	Peta Citra Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar.....	35
Gambar 3.3	Diagram <i>SWOT</i>	47
Gambar 4.1	Peta Administrasi Kabupaten Takalar	50
Gambar 4.2	Peta Administrasi Kecamatan Pattallassang	55
Gambar 5.1	Diagram Persentase Alamat Domisili PKL Kecamatan Pattallassang	65
Gambar 5.2	Peta Kecamatan Domisili PKL.....	66
Gambar 5.3	Label Perusda yang Ditempelkan Pada Modul PKL yang Terdata	71
Gambar 5.4	Diagram Jenis Retribusi/Pajak PKL.....	72
Gambar 5.5	Peta Jumlah PKL tiap kelurahan di Kecamatan Pattallassang	74
Gambar 5.6	Potret Tata Letak Modul PKL di Kecamatan Pattallassang	76
Gambar 5.7	Pola Penyebaran Memanjang (<i>Linear</i>).....	77
Gambar 5.8	Pola Penyebaran Mengelompok (<i>Focus Aglomeraton</i>).....	77
Gambar 5.9	Peta Sebaran PKL di Kecamatan Pattallassang.....	78
Gambar 5.10	Diagram Persentase Waktu Operasional PKL.....	81
Gambar 5.11	Diagram Persentase Sumber Air bersih PKL di Kecamatan Pattallassang	83
Gambar 5.12	Sumber bahan baku PKL di Kecamatan Pattallassang.....	85
Gambar 5.13	Peta Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar	88
Gambar 5.14	Peta Titik-Titik Fasilitas Keamanan di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar.....	90
Gambar 5.15	Peta Jaringan Jalan Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar	92
Gambar 5.16	Peta Fasilitas Publik yang Sering dikunjungi di Kecamatan Pattallassang	94
Gambar 5.17	Peta jaringan Drainase Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar.....	97

Gambar 5.18	Peta Simpul-Simpul Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar	101
Gambar 5.19	Peta Kawasan Terbangun Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar ..	103
Gambar 5.20	Peta Penggunaan Lahan di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar	106
Gambar 5.21	Hasil Kombinasi Nilai Faktor “Kekuatan”	110
Gambar 5.22	Hasil Kombinasi Nilai Faktor “Kelemahan”	110
Gambar 5.23	Hasil Kombinasi Nilai Faktor “Peluang”	110
Gambar 5.24	Hasil Kombinasi Nilai Faktor “Ancaman”	110
Gambar 5.25	Diagram <i>SWOT IFAS/EFAS</i>	114
Gambar 5.26	Peta Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan PKL Kawasan Pasar Sentral Takalar	139
Gambar 5.27	Peta Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan PKL Kawasan Masjid Agung Takalar	140
Gambar 5.28	Peta Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan PKL Kawasan Lapangan dan Alun-Alun H. Makkatang Dg. Sibali	141
Gambar 5.29	Peta Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan PKL Kawasan Kuliner Jagung Panaikang	142

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 3.1	Variabel Penelitian	38
Tabel 3.2	Faktor-Faktor Strategis Internal (<i>Internal Strategic Factors Analysis Summary/IFAS</i>)	45
Tabel 3.3	Faktor-Faktor Strategis Eksternal (<i>External Strategic Factors Analysis Summary/EFAS</i>)	45
Tabel 3.4	Matriks <i>SWOT</i>	46
Tabel 4.1	Jumlah, <i>Sex Ratio</i> , dan Kepadatan Penduduk Tahun 2020	51
Tabel 4.2	Luas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Pattallassang Tahun 2020	54
Tabel 4.3	Jumlah dan Persebaran Penduduk Kecamatan Pattallassang Tahun 2020	56
Tabel 4.4	Persentase dan Laju Pertumbuhan Kecamatan Pattallassang Tahun 2020	57
Tabel 4.5	Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Pattallassang Tahun 2020.....	58
Tabel 4.6	Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Pattallassang Tahun 2020.....	59
Tabel 4.7	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kecamatan Pattallassang Tahun 2020.....	60
Tabel 4.8	Jumlah Sarana Ibadah di Kecamatan Pattallassang Tahun 2020.....	61
Tabel 5.1	Alamat Domisili PKL.....	62
Tabel 5.2	Usia/Umur PKL di Kecamatan Pattallassang.....	67
Tabel 5.3	Lama/Usia Menjadi PKL di Kecamatan Pattallassang.....	68
Tabel 5.4	Jumlah Tanggungan Keluarga PKL di Kecamatan Pattallassang	68
Tabel 5.5	Tingkat pendidikan PKL di Kecamatan Pattallassang	69
Tabel 5.6	Tingkat Pendapatan PKL di wilayah penelitian	70
Tabel 5.7	Pengelolaan PKL Oleh Pemerintah di wilayah penelitian.....	71
Tabel 5.8	Retribusi/Pajak PKL di wilayah penelitian	72
Tabel 5.9	Lokasi Berdagang PKL di Kecamatan Pattallassang	73
Tabel 5.10	Tata Letak PKL di Kecamatan Pattallassang	75
Tabel 5.11	Tipologi Modul PKL di Kecamatan Pattallassang	79
Tabel 5.12	Model Penitipan Modul PKL di Kecamatan Pattallassang	80
Tabel 5.13	Jenis Komoditi Materi Dagangan PKL di Kecamatan Pattallassang	80

Tabel 5.14	Perilaku Membuang Sampah PKL di Kecamatan Pattallassang	82
Tabel 5.15	Perilaku Membuang Limbah Cair PKL di Kecamatan Pattallassang.....	82
Tabel 5.16	Jenis Komoditi Materi Dagangan PKL di Kecamatan Pattallassang	84
Tabel 5.17	Penggunaan Lahan di Kecamatan Pattallassang Tahun 2015	104
Tabel 5.18	Hasil Analisis <i>VIS</i>	105
Tabel 5.19	Faktor-faktor Internal	108
Tabel 5.20	Faktor-faktor Eksternal.....	109
Tabel 5.21	Hasil Penilaian Faktor -Faktor Internal	111
Tabel 5.22	Hasil Penilaian Faktor -Faktor Eksternal.....	112
Tabel 5.23	Matriks Strategi S-O Penentuan Pusat-Pusat Kegiatan PKL yang Ramah Lingkungan di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar	115
Tabel 5.24	Matriks Strategi S-T Penentuan Pusat-Pusat Kegiatan PKL yang Ramah Lingkungan di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar	118
Tabel 5.25	Matriks Strategi W-O Penentuan Pusat-Pusat Kegiatan PKL yang Ramah Lingkungan di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar	121
Tabel 5.26	Matriks Strategi W-T Penentuan Pusat-Pusat Kegiatan PKL yang Ramah Lingkungan di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar	124
Tabel 5.27	Parameter Penyusunan Strategi Penentuan Pusat-Pusat Kegiatan PKL berdasarkan 5 aspek lingkungan-fisik yang dapat menentukan tingkat keramah-lingkungan suatu kota.....	130
Tabel 5.28	Indikasi Program.....	133

DAFTAR RUMUS

Rumus 1	Besaran Sampel yang Diperlukan.....	41
Rumus 2	Total Kebutuhan Lahan	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Pengumpulan Data dari DPMPTSP Prov. Sulsel.....	153
Lampiran 2	Surat Rekomendasi dari Kantor Kesbangpol Kabupaten Takalar.....	154
Lampiran 3	Surat Izin Penelitian dari DPMPTSPTK&T Kabupaten Takalar.....	155
Lampiran 4	Dokumentasi Hasil Survey	156
Lampiran 5	Format Kuesioner/Angket (<i>g-form</i>).....	157
Lampiran 6	Format Penilaian para ahli (<i>Experct Choice</i>)	162

STRATEGI PENENTUAN PUSAT-PUSAT KEGIATAN PKL YANG RAMAH LINGKUNGAN DI KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN TAKALAR

Nur Jayadi¹, Arifuddin Akil², Mukti Ali³

¹ Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Email: andinurjayadi@gmail.com

² Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Email: arifuddin@unhas.ac.id

³ Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Email: mukti_ali93@yahoo.com

ABSTRAK

Sebagai pusat administrasi dan bisnis di Kabupaten Takalar, Kecamatan Pattallassang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Data 10 tahun terakhir (2010-2020) menunjukkan adanya penambahan penduduk sebesar 11,57% atau sebanyak 4.546 jiwa di Kecamatan Pattallassang. Perkembangan yang sangat pesat (*rapid urban growth*) tersebut tidak disertai dengan pertumbuhan kesempatan bekerja yang memadai. Sehingga, perkembangan sektor informal seperti PKL di Kecamatan Pattallassang menjadi alternatif oleh sebagian masyarakat dalam menyikapi keterbatasan lapangan pekerjaan. Kondisi PKL di Kecamatan Pattallassang yang penempatan sarana dagangannya tidak teratur dan tidak tertata serta sering menempati tempat umum menimbulkan dampak negatif bagi citra perkotaan dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak teratur. Keadaan tersebut memicu adanya kondisi yang tidak ramah lingkungan terhadap aktivitas PKL di Kecamatan Pattallassang. Selain itu, pola penyebaran aktivitas PKL cenderung menyesuaikan dengan tempat-tempat keramaian atau mengikuti pola jalan yang dinilai strategis untuk berdagang. Sehingga, sangat sulit menunjukkan pusat-pusat kegiatan PKL di kecamatan Pattallassang. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun strategi penentuan pusat-pusat kegiatan PKL yang ramah lingkungan di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar dengan menitik beratkan pada aspek penataan ruangnya untuk mewujudkan pemanfaatan ruang secara maksimal. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dan studi literatur. Teknik analisis data yakni analisis deskriptif, analisis spasial, analisis *VIS*, analisis *AHP* dan analisis *SWOT*. Hasil penelitian menunjukkan lokasi potensial dijadikan pusat-pusat aktivitas PKL berbasis ramah lingkungan di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar.

Kata kunci: PKL, Pusat Kegiatan, Ramah Lingkungan, Kecamatan Pattallassang

STRATEGY FOR DETERMINING ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PKL ACTIVITY CENTERS IN PATTALLASSANG DISTRICT, TAKALAR REGENCY

Nur Jayadi¹, Arifuddin Akil², Mukti Ali³

¹ Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Email: andinurjayadi@gmail.com

² Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Email: arifuddin@unhas.ac.id

³ Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Email: mukti_ali93@yahoo.com

ABSTRACT

Pattallassang Subdistrict is rapidly developing as the administrative and business center of Takalar Regency. In the last ten years (2010-2020), the population of Pattallassang District increased by 11.57 percent, or 4,546 persons. This increasing urbanization is not accompanied by a sufficient increase in job possibilities. As a result, the growth of the informal sector in Pattallassang District, such as street sellers, provides an option for those people who are unable to find work. Unfortunately, the state of street vendors in Pattallassang Sub-district, where their selling facilities are placed in an irregular and chaotic manner and frequently occupy public spaces, has a detrimental impact on the urban image, giving the impression of being dirty, shabby, and disorganized. This arrangement creates conditions in Pattallassang District that are not conducive to the activity of street sellers. Furthermore, the distribution pattern of street vendors' operations tends to adapt to congested areas or follow route patterns that are deemed strategic for dealing. As a result, pinpointing the locations of street sellers in Pattallassang sub-district is quite difficult. The goal of this research is to devise a method for identifying environmentally friendly PKL activity centers in Pattallassang District, Takalar Regency, by focusing on the aspect of spatial design to achieve maximum space utilization. The data used are primary and secondary data gathered from questionnaire distribution and literature reviews. Descriptive analysis, spatial analysis, VIS analysis, AHP analysis and SWOT analysis are examples of data analysis methodologies. The study's findings suggest that the probable area in Pattallassang District, Takalar Regency, could be utilised as ecologically friendly PKL activity centers.

Keywords: PKL, Activity Center, Eco-Friendly, Pattallassang District

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor informal seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) sering dikaitkan dengan kemiskinan—yakni bahwa para pelakunya melakukan kegiatan lain dan skala ekonomi usaha yang mereka lakukan adalah hanya untuk sekadar bertahan hidup. Jika ada peluang lain yang lebih baik disektor formal, maka pelaku kegiatan ekonomi informal ini akan meloncat ke sektor formal (Widyaningrum, 2014). Kehadiran PKL pun bukan semata-mata keinginan para PKL untuk memperoleh pendapatan, tetapi karena tuntutan kebutuhan masyarakat yang menjadikannya sebagai alternatif terbaik bagi kelompok yang berdaya beli rendah (Akil, 2021).

Maslow dalam Yudono (2021) menjelaskan kebutuhan dasar manusia, bahwa manusia memerlukan delapan dasar kebutuhan salah satunya *biologic and physiologic*. Bila dikaitkan dengan aktivitas PKL, maka manusia membutuhkan pusat kegiatan PKL yang ramah lingkungan. Pemaknaan tersebut dikaitkan pula dengan kebutuhan dasar manusia yang lain yakni *Belongingness and love* yang berarti ruang terbuka publik harus teratur, ramah, efisien dan optimalisasi setiap fungsi ruangnya.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada dasarnya telah mengatur kepastian dan status bagi pelaku UMKM termasuk pelaku ekonomi informal. Pasal 3 (tiga) undang-undang ini menyebutkan UMKM bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional. Selanjutnya, sektor informal seperti PKL muncul sebagai produk dari proses urbanisasi dan modernisasi yang belum selesai (Soetomo, 2009 dalam Murtanti, dkk, 2016). Pernyataan tersebut pun terjadi di Kecamatan Pattallassang yang merupakan ibukota Kabupaten Takalar. Sebagai pusat administrasi dan bisnis di Kabupaten Takalar, Kecamatan Pattallassang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada tahun 2020, presentasi penduduk di Kecamatan Pattallassang sebesar 13,05% dari jumlah penduduk

Kabupaten Takalar atau sebesar 39.275 jiwa yang tersebar di 9.471 rumah tangga (BPS: Kabupaten Takalar dalam Angka, 2021). Padahal, ditahun 2010 lalu, penduduk Kecamatan Pattallassang sebesar 34.729 jiwa yang tersebar di 8.048 rumah tangga (BPS: Kabupaten Takalar dalam Angka, 2011). Sehingga jelas terlihat dalam 10 tahun terakhir, terjadi penambahan penduduk sebesar 11,57% atau sebanyak 4.546 jiwa di Kecamatan Pattallassang. Pertambahan penduduk tersebut pun disertai dengan peningkatan jumlah rumah tangga sebanyak 1.423 rumah tangga.

Sektor UMKM termasuk PKL mengalami peningkatan jumlah pelaku usaha yang disebabkan adanya fenomena pertumbuhan penduduk di atas. Pada tahun 2021, jumlah pelaku UMKM di Kecamatan Pattallassang sebanyak 10.517 atau sebanyak 18% dari jumlah UMKM Kabupaten Takalar yang sebanyak 58.831 pelaku usaha (Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, 2022). Persentase tersebut menempatkan Kecamatan Pattallassang sebagai kecamatan dengan jumlah pelaku usaha terbanyak di Kabupaten Takalar.

Dampak besarnya jumlah UMKM seperti yang dialami Kecamatan Pattallassang telah diungkapkan oleh Alisjahbana (2003) dalam Rasdiana (2013) yang menyebutkan perkembangan kota secara pesat (*rapid urban growth*) yang tidak disertai dengan pertumbuhan kesempatan pekerjaan yang memadai mengakibatkan kota-kota menghadapi berbagai ragam *problem social* yang sangat pelik. Sehingga, perkembangan sektor informal seperti PKL di Kecamatan Pattallassang menjadi alternatif oleh sebagian masyarakat dalam menyikapi keterbatasan lapangan pekerjaan tersebut.

Kehadiran PKL mulai menimbulkan konflik ketika mereka menggunakan/menyerobot ruang-ruang publik yang mereka anggap strategis secara ekonomis, seperti jalan, trotoar, jalur hijau (taman), dan sebagainya (Wiyono, 2009). Hal serupa pun ditunjukkan oleh kondisi PKL di Kecamatan Pattallassang yang penempatan sarana perdagangannya tidak teratur dan tidak tertata serta sering menempati tempat yang menjadi tempat umum. Sehingga, Chambert (1992) dalam Akil (2021) menyebutkan kehadiran PKL sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi citra perkotaan dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib.

Keadaan tersebut memicu adanya kondisi yang tidak ramah lingkungan terhadap aktivitas PKL di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar.

Selain itu, pola penyebaran aktivitas PKL di Kecamatan Pattallassang cenderung menyesuaikan dengan tempat-tempat keramaian atau mengikuti pola jalan yang dinilai strategis untuk berdagang. Pola penyebaran tersebut menimbulkan kesan ketidakteraturan dan aktivitas yang belum terpusat. Sehingga, sangat sulit untuk menunjukkan pusat-pusat kegiatan PKL di kecamatan tersebut.

Beberapa uraian di atas menunjukkan kondisi ideal Pedagang Kaki Lima (PKL) ditandai dengan adanya pusat-pusat kegiatan PKL yang dituntut berkondisi ramah lingkungan. Disisi lain, kondisi eksisting bagi PKL di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar menunjukkan belum ada pusat-pusat kegiatan PKL dan penempatan sarana PKL tidak teratur dan tidak tertata menimbulkan kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib serta sering menempati tempat yang menjadi tempat umum seperti jalan, trotoar, jalur hijau (taman), dan sebagainya sehingga menimbulkan kesan tidak ramah lingkungan.

Berdasarkan kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi eksisting tersebut di atas, diperlukan strategi penentuan pusat-pusat kegiatan PKL yang ramah lingkungan di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar dengan meniti beratkan pada aspek penataan ruangnya untuk mewujudkan pemanfaatan ruang secara maksimal di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, pertanyaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana karakteristik PKL di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar?
2. Bagaimana daya dukung dan daya tampung lahan untuk penataan kualitas PKL yang ramah lingkungan di wilayah tersebut?
3. Bagaimana arahan penentuan pusat-pusat kegiatan PKL yang ramah lingkungan di wilayah tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Mengetahui karakteristik PKL di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar
2. Mengetahui daya dukung dan daya tampung lahan untuk penataan kualitas PKL yang ramah lingkungan di wilayah tersebut.
3. Menyusun arahan penentuan pusat-pusat kegiatan PKL yang ramah lingkungan di wilayah tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan antara lain sebagai berikut.

1. Pada bidang ilmu PWK, sebagai bahan pembelajaran dan pengalaman tentang arahan penentuan pusat-pusat kegiatan PKL yang ramah lingkungan di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar.
2. Bagi pemerintah dan instansi terkait, sebagai masukan terhadap penyusunan kebijakan dan rencana strategis pemerintah dalam upaya peningkatan sektor-sektor ekonomi, khususnya sektor ekonomi informal.
3. Bagi masyarakat dan PKL, sebagai informasi dan strategi dalam mengembangkan pusat-pusat kegiatan PKL yang ramah lingkungan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

1.5.1 Lingkup Substansi

Penelitian ini memiliki lingkup substansi yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi karakteristik PKL di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar.
2. Menjelaskan daya dukung dan daya tampung lahan untuk penataan kualitas PKL yang ramah lingkungan di wilayah tersebut.
3. Penyusunan arahan penentuan pusat-pusat kegiatan PKL yang ramah lingkungan di wilayah tersebut.

1.5.2 Lingkup Lokasi

Lokasi penelitian mencakup wilayah administrasi Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.

1.6 Produk Penelitian

Produk penelitian yang dihasilkan adalah sebagai berikut.

1. Skripsi yang berisi 6 bab dengan judul “*Strategi Penentuan Pusat-Pusat Kegiatan PKL yang Ramah Lingkungan di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar*”.
2. Jurnal dari skripsi mengenai strategi penentuan pusat-pusat kegiatan PKL yang ramah lingkungan di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar.
3. Poster mengenai strategi penentuan pusat-pusat kegiatan PKL yang ramah lingkungan di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar.
4. *Summary book* mengenai strategi penentuan pusat-pusat kegiatan PKL yang ramah lingkungan di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar.
5. Bahan presentasi dalam bentuk *file powerpoint* mengenai strategi penentuan pusat-pusat kegiatan PKL yang ramah lingkungan di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar.

1.7 Dampak Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, dampak yang diharapkan antara lain:

1. Meningkatkan perhatian dan pengetahuan masyarakat dan pemerintah terkait konsep pembangunan kota/kawasan yang memperhatikan keteraturan ruang.
2. Ditemukan ide strategi untuk mewujudkan keteraturan ruang di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar utamanya pada sektor informal melalui penentuan pusat-pusat kegiatan PKL yang ramah lingkungan.
3. Meningkatkan citra Kecamatan Pattallassang sebagai pusat administrasi (ibukota) Kabupaten Takalar.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini terdiri dari enam bab yang memuat latar belakang hingga hasil dan pembahasan. Disusun secara berurutan dan terstruktur sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang yang menerangkan fenomena PKL dan rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian ini menguraikan kajian NSPK, penelitian-penelitian terdahulu dan kerangka pikir penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat sifat dan jenis penelitian, waktu dan wilayah penelitian, jenis data dan metode pengumpulan data, Teknik survei (populasi dan perhitungan sampel serta teknik pengambilan sampel). Terdapat pula teknik analisis data dan definisi operasional.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Pada bagian ini berisikan gambaran umum Kabupaten Takalar dan Kecamatan Pattalassang yang terdiri dari kondisi geografis, wilayah administrasi, profil kependudukan, dan kondisi sosial budaya.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi penjelasan data survei, hasil analisis dan pemaknaan hasil analisis terkait strategi penentuan pusat-pusat kegiatan PKL yang ramah lingkungan di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian NSPK

Kajian norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) terkait strategi penentuan pusat-pusat kegiatan PKL yang ramah lingkungan di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar meniti beratkan pada pembahasan undang-undang terkait, kriteria/karakteristik sektor informal, PKL dan konsep ramah lingkungan serta teori terkait dalam penentuan lokasi.

2.1.1 Kebijakan/Undang-Undang Terkait

Kebijakan/aturan yang disajikan berkaitan erat dengan penataan sektor informal khususnya PKL. Kebijakan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 6 Tahun 2012. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

Kawasan Strategis (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kawasan Strategis dikelompokkan menjadi tiga tingkatan (Bab I Pasal 5) yang meliputi:

- Kawasan Strategis Nasional (ayat 29)
- Kawasan Strategis Provinsi (ayat 30)
- Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (ayat 31)

Ketiganya memiliki penjelasan yang sama terkait Kawasan strategis, yaitu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup nasional/provinsi/kabupaten kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Kawasan Perkotaan Maminasata (Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Maminasta Pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar selanjutnya disebut

Kawasan Perkotaan Mamminasata adalah satu kesatuan kawasan perkotaan yang terdiri atas Kota Makassar sebagai kawasan perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Maros di Kabupaten Maros, Kawasan Perkotaan Sungguminasa di Kabupaten Gowa, Kawasan Perkotaan Takalar di Kabupaten Takalar, sebagai kawasan perkotaan di sekitarnya, yang membentuk kawasan metropolitan.

Bagian IV tentang Cakupan Kawasan Perkotaan Maminasata, Pasal 5 huruf b, menjelaskan seluruh wilayah Kabupaten Takalar yang mencakup 9 (sembilan) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Sanrobone, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong, dan Kecamatan Galesong Utara.

Adapun posisi/peran Kabupaten Takalar sebagai kawasan perkotaan di sekitar kawasan inti Maminasata yaitu:

- Pusat pemerintahan kabupaten dan kecamatan
- Pusat perdagangan dan jasa skala regional
- Pusat pelayanan pendidikan tinggi
- Pusat kegiatan pertanian
- Pusat pelayanan olah raga
- Pusat pelayanan kesehatan
- Pusat kegiatan industri perikanan
- Pusat kegiatan industri manufaktur
- Pusat kegiatan transportasi laut regional
- Pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara
- Pusat kegiatan pariwisata
- Pusat pelayanan system angkutan umum penumpang dan angkutan barang

Kawasan Peruntukan Perdagangan (Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 6 Tahun 2012)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar Tahun 2012-2031 Pasal 41 ayat 2 menetapkan Kecamatan Pattallassang sebagai kawasan peruntukan pusat kegiatan pemerintahan. Selanjutnya Pasal 41 ayat 3 menetapkan pula Kecamatan

Pattallassang sebagai kawasan pusat perdagangan dan jasa regional. Terkait Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), Pasal 45 ayat 2 huruf b menetapkan Kecamatan Pattallassang sebagai kawasan pusat perkotaan untuk kawasan dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pasal-pasal lain dalam peraturan daerah ini menetapkan Kecamatan Pattallassang sebagai:

- Pusat pemerintahan kabupaten;
- Pusat perdagangan dan jasa skala regional;
- Pusat pelayanan pendidikan tinggi;
- Pusat pelayanan olah raga;
- Pusat pelayanan kesehatan;
- Pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
- Pusat kegiatan pariwisata;
- Pusat pelayanan system angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
- Kawasan rawan bencana banjir;
- Kawasan peruntukan pertanian; dan
- Kawasan peruntukan permukiman.

2.1.2 Sektor Informal

Budi (2006) dalam Akil (2021) mengemukakan definisi sektor informal yaitu suatu kelompok usaha yang berskala kecil, tidak memiliki legalitas hukum, pola usahanya bersifat sederhana dan menggunakan sistem kekeluargaan, dilakukan oleh dan untuk masyarakat golongan menengah kebawah dan dalam aktivitasnya tidak diperlukan keterampilan khusus. Selanjutnya, ciri-ciri sektor informal sebagaimana di kutip dari Todaro (2000) dalam Akil (2021) meliputi:

1. Sebagian besar memiliki produksi yang berskala kecil, aktivitas-aktivitas jasa dimiliki oleh perorangan atau keluarga, dan dengan menggunakan teknologi yang sederhana;
2. Umumnya para pekerja bekerja sendiri dan sedikit yang memiliki pendidikan formal;
3. Produktifitas pekerja dan penghasilannya cenderung lebih rendah daripada di sektor formal;

4. Para pekerja di sektor informal tidak dapat menikmati perlindungan seperti yang didapat dari sektor formal dalam bentuk jaminan kelangsungan kerja, kondisi kerja yang layak dan jaminan pensiun;
5. Kebanyakan pekerja yang memasuki sektor informal adalah pendatang baru dari desa yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja di sektor formal;
6. Motivasi mereka biasanya untuk mendapatkan penghasilan yang bertujuan hanya untuk dapat bertahan hidup dan bukannya untuk mendapatkan keuntungan, dan hanya mengandalkan pada sumber daya yang ada pada mereka untuk menciptakan pekerjaan;
7. Mereka berupaya agar sebanyak mungkin anggota keluarga mereka ikut berperan serta dalam kegiatan yang mendatangkan penghasilan dan meskipun begitu mereka bekerja dengan waktu yang panjang; dan
8. Kebanyakan diantara mereka menempati gubuk-gubuk yang mereka buat sendiri di kawasan kumuh (*slum area*) dan permukiman liar (*schelter*) yang umumnya kurang tersentuh pelayanan jasa seperti listrik, air, transportasi serta jasa-jasa kesehatan dan pendidikan.

2.1.3 Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL)

PKL adalah seseorang atau kelompok orang yang menjalankan usahanya dengan memanfaatkan fasilitas umum yang digunakan sebagai lokasi berdagang (Akil, 2021). Beberapa pengertian dari sumber referensi lain tentang pedagang kaki lima antara lain: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi V, “PKL adalah pedagang yang berjualan di serambi muka (*emper*) toko atau tepi jalan (di trotoar)”. Definisi lain menyebutkan “kaki lima adalah lantai yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah” (Poerwadarminta, 1999 dalam Akil, 2021). Pengertian ini lebih cenderung dimaksudkan untuk peruntukan bagian depan bangunan rumah toko, dimana di zaman dahulu silam terjadi kesepakatan antar perencana kota bahwa bagian depan (serambi) dari toko dengan lebar sekitar lima kaki dan diwajibkan dijadikan suatu jalur dimana pejalan kaki dapat melintas. Namun ruang selebar kira-kira lima kaki itu tidak lagi berfungsi sebagai jalur lintas bagi pejalan kaki, melainkan telah berubah fungsi menjadi area tempat jualan barang-barang dagangan pedagang kecil.

Manning dan Tadjudin (1985) menyebutkan bahwa PKL adalah salah satu pekerjaan yang paling nyata dan penting di kebanyakan kota di Afrika, Asia, Timur Tengah dan Amerika Latin. Menurut McGee dan Yeung (1977) dalam Akil (2021) PKL mempunyai pengertian yang sama dengan "hawkers", yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual di ruang umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar. Selanjutnya berdasarkan rangkuman kajian pustaka yang dilakukan oleh Budi (2006) dikemukakan bahwa PKL adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, yaitu melayani kebutuhan barang-barang atau makanan yang dikonsumsi langsung oleh konsumen, yang dilakukan cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan modal yang kecil/terbatas, dalam melakukan usaha tersebut menggunakan peralatan sederhana dan memiliki lokasi di tempat-tempat umum (terutama di atas trotoar atau sebagian badan jalan), dengan tidak mempunyai legalitas formal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

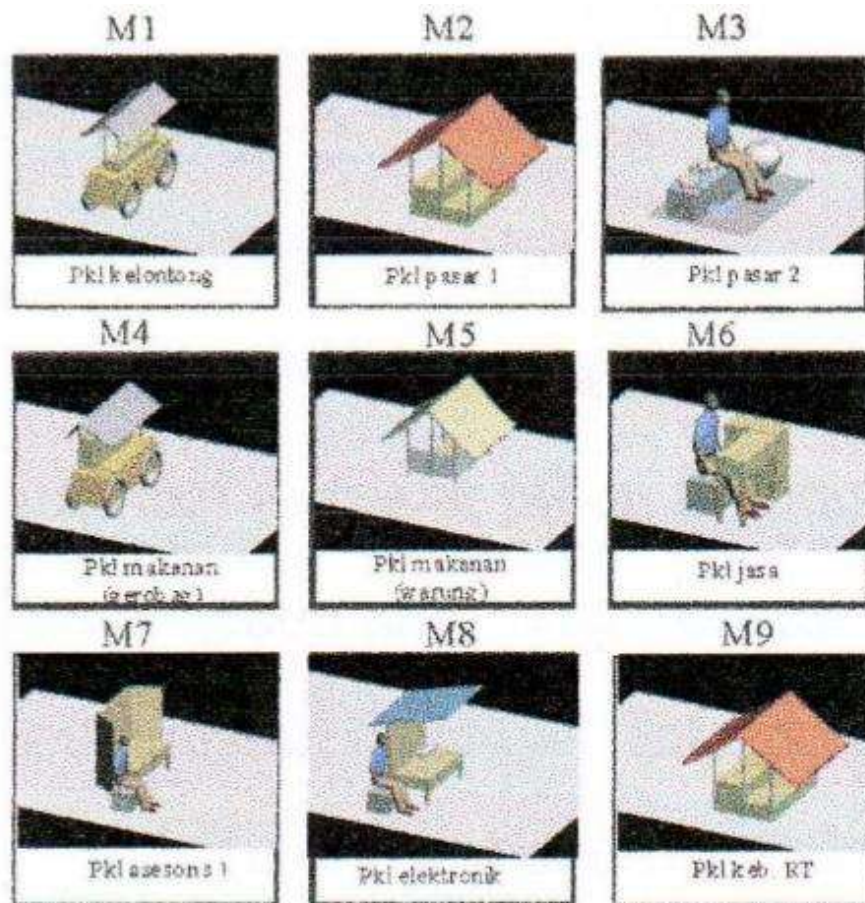
2.1.4 Karakteristik PKL

Vincentia (2008) dalam Akil (2021) menjelaskan jenis dan karakter aktivitas PKL meliputi:

- a. Kategorisasi jenis komoditi materi dagangan PKL, meliputi:
 - 1) PKL Kelontong: *snack*, rokok, koran-majalah;
 - 2) PKL Pasar: sayur, buah, daging, bumbu dapur, bunga;
 - 3) PKL Makanan: gorengan, masakan, jajan pasar;
 - 4) PKL Jasa: servis jam, emas, sol sepatu;
 - 5) PKL Asesoris: stiker, poster, pita jepit rambut, sepatu, kaus kaki, sandal, tas, kacamata;
 - 6) PKL elektronik: kipas angin, setrika, *VCD-tape*; dan
 - 7) PKL kebutuhan rumah tangga: baju, alat dapur, mainan anak.

- b. Jumlah atau intensitas PKL
- c. Waktu operasional PKL
- d. Modul ruang yang dipergunakan PKL
- e. Posisi ruang jalan yang ditempati PKL

Adapun jenis-jenis tipologi PKL seperti yang telah ditemukan oleh Vincentia (2008) dalam Akil (2021) dapat ditunjukkan dalam bentuk sketsa tipologi sebagai berikut.



Gambar 2.1 Tipologi Karakter Fisik Modul PKL

Sumber: Vincentia, 2008 dalam Akil, 2021

Gambar 2.1 di atas menunjukkan tipologi modul yang digunakan PKL untuk berdagang yang diberi Kode “Mn” yang berarti modul *type* n. M1 menunjukkan modul *type* kelontong, M2 menunjukkan modul *type* pasar 1, M3 menunjukkan modul *type* pasar 2, M4 menunjukkan modul *type* makanan (gerobak), M5 menunjukkan modul *type* makanan (warung), M6 menunjukkan modul *type* jasa,

M7 menunjukkan modul *type* asesoris, M8 menunjukkan modul *type* elektronik dan M9 menunjukkan modul *type* kebutuhan rumah tangga.

2.1.5 Teori Lokasi terkait penataan PKL di Perkotaan

Menurut teori lokasi Von Thunen dalam Akil (2021) menganalisis distribusi spasial kegiatan produksi, bahwa lahan yang terletak di pusat kota akan lebih mahal di bandingkan lahan yang jauh dari pusat kota karena makin jauh jarak dari pusat kegiatan, akan meningkatkan biaya transportasi. menurut Von Thunen lokasi akan dipengaruhi oleh variabel *urban growth*, perekonomian, politik, bahkan budaya masyarakat (gaya hidup). Teori Christaller (1966) dalam Akil (2021) menjelaskan bahwa jika persebaran penduduk dan daya belinya sama, sumber daya dan fasilitas tranportasinya sama, lalu pusat-pusat pemukiman menyediakan layanan yang sama, maka akan membentuk kesamaan jarak antara pusat-pusat pemukiman. Dikatakan bahwa ada hubungan erat antara jumlah penduduk pendukung suatu wilayah dengan tingkatan (hirarki) dari pusat pelayanannya.

Adapun Teori Boudeville berusaha menjelaskan mengenai dampak pembangunan dari adanya kutub-kutub pembangunan yang terlokalisasi pada tata ruang secara geografis. Menurut Alfred Weber, lokasi terbaik berbiaya rendah dari sebuah industri adalah daerah strtaegis yang dapat menghubungkan antara bahan baku dan marketnya. Menurut Sjafrizal (2008), sebuah usaha/perusahaan akan memilih suatu tempat sebagai lokasi yang optimal berdasarkan kekuatan persaingan antar tempat dan luas pasar yang dapat dikuasanya. Selanjutnya menurut Ferroux dalam Kuncoro (2002), pusat pertumbuhan ekonomi merupakan suatu tempat dalam ruang/wilayah dilihat berdasarkan dari mana kekuatan-kekuatan *sentrifugal* memancar dan kemana kekuatan-kekuatan *sentripental* ditarik (Akil, 2021).

Teori lokasi menurut Hoover dan Giarratani (2007) dalam Hamdan (2017) didefinisikan sebagai ilmu yang menyelidiki tata ruang (*spatial order*) kegiatan ekonomi. Atau dapat juga diartikan sebagai ilmu tentang alokasi secara geografis dari sumber daya yang langka, serta hubungannya atau pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha atau kegiatan lain (*activity*). Secara umum, pemilihan lokasi oleh suatu unit aktivitas ditentukan oleh beberapa faktor seperti: bahan baku lokal

(*local input*); permintaan lokal (*local demand*); bahan baku yang dapat dipindahkan (*transferred input*); dan permintaan luar (*outside demand*).

Dikutip dari Tjiptono (2002) dalam Hamdan (2017) pemilihan tempat atau lokasi usaha memerlukan pertimbangan cermat terhadap faktor-faktor berikut ini.

1. Aksesibilitas, misalnya lokasi yang dilalui atau mudah di jangkau sarana transportasi umum;
2. Visibilitas, yaitu lokasi atau tempat yang dapat dilihat dengan jelas dari jarak pandang normal;
3. Ekspansi, yaitu tersedianya tempat yang cukup luas apabila ada perluasan dikemudian hari;
4. Lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung produk yang ditawarkan;
5. Tempat parkir yang luas, nyaman, dan aman, baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat;
6. Peraturan pemerintah, misalnya ketentuan yang melarang PKL berjualan di lokasi-lokasi tertentu.

Dikutip dari Witjaksono (2005) dalam Hamdan (2017) dasar pertimbangan dalam mengalokasikan kegiatan PKL mempunyai beberapa kriteria lokasi, kriteria yang dimaksud adalah lokasi tersebut harus strategis dan mempunyai nilai lahan yang sangat rendah. Disamping kedua aspek tersebut faktor yang lainnya adalah:

1. Lokasi PKL berdekatan dengan kegiatan primer, karena PKL cenderung untuk mendekati konsumen yang tidak terjangkau oleh sektor formal, sehingga kegiatan PKL memberikan alternatif bagi konsumen.
2. Sirkulasi penduduk yang relatif tinggi, karena kegiatan PKL biasanya cenderung mendatangi konsumen, sehingga lokasi yang mempunyai konsentrasi penduduk yang tinggi akan menjadi daya tarik bagi PKL dengan harapan mendapatkan konsumen.

2.1.6 Ramah Lingkungan

Aspek ramah lingkungan erat kaitannya dengan perwujudan kota berkelanjutan. Walaupun kota berkelanjutan (*sustainable city*) bukanlah sesuatu yang baru, namun ide ini mulai mendapat perhatian yang luas sejak awal tahun 1980, khususnya untuk

mengelaborasi ide pembangunan berkelanjutan yang dikembangkan sejak Konferensi Bumi di Stockholm pada tahun 1974. Sebelumnya, sudah sejak awal abad ke-20, ide tentang “*Garden City*” yang dilontarkan oleh Ebenezer Howard, sesungguhnya juga konsen tentang kondisi lingkungan perkotaan. Howard telah merumuskan beberapa kriteria dasar pembangunan kota yang ramah lingkungan (Hall, 1990). Dikutip dari penelitian yang dilakukan oleh Haryadi dan Setiawan (2002) pun menyebutkan terdapat lima syarat khusus yang harus dipenuhi agar tercapai pembangunan kota yang berkelanjutan, yaitu:

1. pemerataan dalam distribusi keuntungan dan pertumbuhan ekonomi;
2. akses terhadap kebutuhan dasar manusia;
3. keadilan sosial dan hak-hak kemanusiaan;
4. kepedulian dan integritas lingkungan; dan
5. kepedulian terhadap adanya perubahan sepanjang ruang dan waktu.

Pada dasarnya, pembangunan kota berkelanjutan sangat memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 menerangkan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Mustafa (2018) menyebutkan bahwa pembangunan lingkungan hidup merupakan bagian sangat penting bagi ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan bagi seluruh makhluk hidup yang diarahkan kepada terwujudnya kelestarian menuju pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan harus dilakukan dengan baik, terpadu dan komprehensif. Penelitian yang dilakukan oleh Mustafa sangat sejalan dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Penjelasan pasal 1 ayat 2 tersebut menunjukkan bahwa setiap orang berhak dan memiliki peran dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup baik sebagai anggota

masyarakat maupun sebagai aparatur pemerintah. Peranan masyarakat yang dimaksud berupa penilaian dengan memberikan pendapat atau analisis kepada pembuat keputusan dan legislatif khususnya pemberian fasilitas ataupun izin kepada orang maupun badan usaha yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Dikutip dari Setiawan (2007) menyebutkan bahwa dalam mengukur kualitas lingkungan hidup, terdapat lima aspek lingkungan-fisik yang dapat menentukan tingkat keramah-lingkungan suatu kota yaitu kualitas udara, air bersih, sampah, perumahan dan ruang terbuka hijau.

Kualitas udara

Kualitas udara menentukan derajat kesehatan warga kota. Semakin meningkatnya kegiatan transportasi, industri kota dan aktivitas perdagangan dapat meningkatkan pencemaran udara dan menurunkan derajat kesehatan warga kota. Kualitas udara dapat diukur dari beberapa indikator yakni: PM₁₀, CO, NO, Pb, SO dan ozon.

Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia. Kuantitas dan kualitas air bersih sangat menentukan derajat kesehatan manusia. Penyediaan air bersih di kota juga sangat menentukan berlangsungnya kegiatan ekonomi kota. Kondisi air bersih satu kota dapat diukur dari beberapa indikator yakni: ketersediaan dari segi jumlah, kualitas, aksesibilitas dan keterjangkauan.

Sampah

Sampah merupakan parameter penting kebersihan kota. Indikator ini dapat diukur dari beberapa aspek yakni: volume sampah total satu kota, rata-rata produksi sampah per penduduk, kapasitas penanganan sampah oleh pemerintah kota dan usaha-usaha penanganan sampah melalui *3R (reduce, reuse, recycle)*.

Perumahan

Lingkungan perumahan tidak hanya menjamin kualitas fisik lingkungan, melainkan menjamin tata kehidupan sosial, kebudayaan dan agama. Kondisi perumahan satu kota dapat diukur dari beberapa indikator antara lain: luasan kawasan kumuh/di bawah *standard*, kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan rumah (*housing backlog*), luasan hunian per orang, aksesibilitas dan tingkat keterjangkauan dari sisi harga.

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

RTH merupakan seluruh area hijau yang ada di suatu wilayah, meliputi area hijau alami (bantaran sungai, semak, hutan kota) maupun area hijau buatan baik berupa lahan pertanian, taman kota, pekarangan dan pohon di sepanjang jalan. Keberadaan dan kualitas RTH menjadi faktor penting kesegaran dan kebersihan udara kota serta memungkinkan siklus hidrologi dalam area perkotaan. Keberadaan RTH juga memungkinkan habitat beberapa jenis hewan di kota serta dapat menjadi ruang yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi bagi masyarakat kota. Sesuai standar perencanaan kota, luas minimal RTH satu kota adalah 30% dari total luas kota.

2.2 Studi Banding

Studi banding yang dilakukan bertujuan untuk melihat kota-kota yang berhasil melakukan penataan bagi PKLnya.

2.2.1 Orchard Road, Singapura

Negara Singapura telah menerapkan kebijakan untuk memusatkan aktivitas para PKLnya. Konsep memusatkan aktivitas PKL tersebut dilatar belakangi dengan adanya respon terhadap keinginan masyarakat yang menginginkan PKL yang memenuhi badan jalan untuk dilakukan penataan. Salah satu pusat kegiatan PKL di Singapura terletak di Jl. Orchard (*Orchard Road*) dengan konsep menyatukan seluruh PKL di dalam satu gedung/ruangan. Perhatikan Gambar 2.2 berikut ini.



Gambar 2.2 Pusat Jajanan untuk Memfasilitasi PKL di Singapura

Sumber: <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-51955587> diakses pada 6 Juli 2022

Gambar 2.2 di atas menunjukkan aktivitas PKL yang terpusat di dalam ruangan di Jl. Orchard. Pusat kegiatan PKL tersebut mengutamakan konsep sajian yang bersih dan ramah lingkungan. Kebersihan jajanan makanan memiliki beberapa aturan

seperti: (1) Tidak memotong dan menyiapkan makanan di atas kayu berpori - permukaan harus terbuat dari *stainless steel*; (2) Pisahkan daging yang dimasak dan tidak dimasak dan simpan pada suhu yang tepat; (3) Pakai sarung tangan; dan (4) Periksa sumber bahan baku. Sementara dari segi aspek ramah lingkungan, pusat kegiatan PKL tersebut ditunjang dengan fasilitas air yang mengalir, ketersediaan listrik, jaringan drainase dan alat penghisap asap.

2.2.2 Kawasan Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Penataan PKL di kawasan Jl. Malioboro Yogyakarta kembali diterapkan di tahun 2022. Penataan ini dilakukan dengan merelokasi pedagang yang ada di Jl. Malioboro. Para PKL dipusatkan di dua area yang disebut “Teras Maliobo 1 dan Teras Malioboro 2” masing-masing area memanfaatkan dua Gedung yang terdapat di Jl. Malioboro yaitu bekas Gedung Bioskop Indra dan bekas Gedung Dinas Pariwisata DIY. Penataan PKL di kawasan Jl. Malioboro dilakukan untuk mengembalikan fungsi sarana dan prasarana yang ada di Jl. Malioboro. Perhatikan Gambar 2.3 berikut ini.



Gambar 2.3 Suasana Pengunjung dan PKL di Teras Malioboro 1

Sumber: <https://yogya.inews.id/berita/penataan-pkl-malioboro-wawali-jogja-pedagang-diberi-ruang-khusus-untuk-berjualan/all> diakses pada 6 Juli 2022

Pemerintah setempat melakukan penataan PKL tidak untuk menghilangkan aktivitas PKL melainkan untuk memberikan ruang khusus bagi PKL untuk melangsungkan aktivitas jual belinya (inewsjogja.id, 2022). Aktivitas para PKL pun tetap berada di Kawasan Jl. Malioboro dengan memanfaatkan Gedung yang sudah tidak digunakan. Penataan PKL yang dilakukan memperoleh respon positif bagi masyarakat dan meningkatkan citra kawasan Jl. Malioboro.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil berbagai penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai masukan, bahan perbandingan dan kajian. Berdasarkan hasil kajian pustaka, terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan tema serupa, sebagaimana yang dijabarkan pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Masalah/pertanyaan riset dan tujuan riset	Variabel/Faktor	Indikator/Parameter	Teknik Analisis	Hasil Riset	Hal-hal yang layak diadopsi/kembangkan	Perbedaan Penelitian
1	Strategi Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Berdasarkan Pola Aktivitas dan Pola Penyebarannya di Koridor Jalan Pejanggik Kecamatan Cakranegara. Baiq Siti Noer Azima, Ardi Yuniarman, dan Sri Apriani Puji Lestari. <i>Journal Planoearth</i> , Vol. 5 No. 1 hal. 14-19 (2020)	Koridor Jalan Pejanggik yang Memiliki Aktivitas Lalu Lintas Cukup Ramai	Pola Penyebaran dan Pola Aktivitas	-	Analisis <i>SWOT</i>	<p>a. Pola aktivitas PKL tidak terlepas dari pengaruh hubungan langsung dan tidak langsung dengan berbagai kegiatan formal maupun kegiatan informal atau hubungan PKL dengan konsumennya.</p> <p>b. Lokasi, jenis dagangan maupun sarana berdagangnya dipengaruhi oleh waktu berdagang PKL itu sendiri, hal ini juga dipengaruhi oleh aktivitas formal yang berada di kawasan koridor Jalan Pejanggik. Pola penyebaran PKL yakni berpola linier karena mengikuti pola jaringan jalan serta pola aktivitas PKL yang cenderung berada di sepanjang jaringan jalan</p>	Melakukan penataan dengan prinsip kemanusiaan, keadilan, kemitraan, kepastian hukum, kejujuran usaha dan persaingan sehat	Output penelitian

						<p>dan jalur pedestrian.</p> <p>d. Strategi penataan PKL berdasarkan analisis <i>SWOT</i> ialah:</p> <p>(a) melakukan penataan dengan prinsip kemanusiaan, keadilan, kemitraan, kepastian hukum, kejujuran usaha dan persaingan sehat,</p> <p>(b) menerapkan konsep simbiosis mutualisme,</p> <p>(c) memanfaatkan ruang bangunan milik bangunan,</p> <p>(d) lokasi penempatan titik PKL harus didukung dengan rencana tata ruang dengan melakukan studi kelayakan terlebih dahulu</p>		
2	Mozaik Pedagang Kaki Lima (PKL) yang Rekreatif dan Ramah	Pedagang Kaki Lima yang Rekreatif dan Ramah Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aksesibilitas 2. Tata letak PKL 3. Jenis dagangan 4. Bentuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemudahan akses dalam menjangkau lokasi 2. Penyebaran 	Tabulasi Presentasi	Kondisi eksisting PKL dan aktivitas masyarakat di wilayah penelitian menunjukkan akses menuju tempat PKL berjualan di	Beberapa variabel dan indikator dalam penelitian ini dapat diadap-kembangkan untuk	Output penelitian

<p>Lingkungan untuk Penguatan Citra Kota Makassar.</p> <p>A. Akil, S. Shaf, F. R. Sari dan N. Jayadi. Jurnal Teknik PWK, Vol. 10(2) No.-hal. 145–158 (2021)</p>	<p>Untuk Penguatan Citra Kota Makassar</p>	<p>gerobak</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pola kerja PKL 6. Dukungan prasarana kota 7. Rekreatif 8. Ramah lingkungan 	<p>memanjang (<i>linier concentration</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Makanan, minuman, kelantong, mainan dan pakaian 4. Gerobak/kereta dorong, meja kayu, gelaran/alas dan pikulan/keranjang 5. Kelengkapan fasilitas pendukung prasarana kota 6. Tampilan gerobak ciri khas kota Makassar, <i>live music</i>, dan gerobak berwarna-warna 7. Tempat sampah 	<p>Anjungan Pantai Losari dan JL. Somba Opu sangat mudah. Hal ini disebabkan pilihan moda transportasi yang beragam dan rute yang mudah dijangkau. Tata letak PKL ditinjau dari penyebaran PKL cenderung memanjang (<i>linear concentration</i>) mengikuti pola jalan. Sedangkan, untuk jenis dagangan PKL cukup beragam mulai dari PKL yang menjual makanan, minuman, pakaian hingga aksesoris. Umumnya PKL mulai berdagang dari pukul 15.30-22.00. Dukungan sarana dan prasarana kota terhadap kegiatan PKL cukup lengkap, mulai dari ketersediaan fasilitas jaringan air bersih, listrik, petugas kebersihan, dan lain-lain. <i>Stakeholder</i> yang berperan dalam aktivitas PKL diantaranya pihak Kecamatan Ujung Pandang, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar</p>	<p>mendukung penentuan variabel lingkungan</p>
---	--	---	---	--	--

				8. panel surya		dan UPT Pengelola Pantai Losari.		
3	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penataan PKL Sebagai Strategi Penataan Ruang Kota Surakarta. Murtanti Jani Rahayu, RR. Ratri Werdiningtyas dan Musywaroh. <i>Journal Region</i> , Vol. 7, No. 2x hal. 109-122 (2016)	Keberhasilan Penataan PKL Sebagai Strategi Penataan Ruang Kota Surabaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas lapak PKL 2. Kondisi sarana dagang PKL 3. Pengaturan waktu pelayanan 4. Pola pengelompokan 5. Tingkat kestrategisan lokasi 6. Keterjangkauan transportasi 7. Kondisi sarana/fasilitas pendukung 8. Parkir 9. Penerangan 10. Air bersih 11. Pembuangan sampah 12. Estetika lingkungan 13. Kedekatan dengan fungsi utama kota 14. Keamanan 	-	Crosstab	PKL dengan jenis dagangan bukan makanan lebih <i>fleksible</i> walaupun sebagian besar cenderung menetap pada suatu lokasi. PKL yang memiliki sifat pelayanan berkeliling adalah PKL dengan jenis dagangan makanan siap saji di tempat lain. PKL makanan siap saji di tempat dan jasa pelayanan cenderung menetap pada suatu lokasi dalam melakukan aktivitasnya dari awal hingga akhir. Beberapa PKL dengan jenis dagangan ini berpindah setelah menetap beberapa waktu. Dari hasil analisis, yang mempengaruhi sifat pelayanan PKL adalah luas lahan dagang yang dibutuhkan, jenis sarana dagang, waktu berdagang dan waktu transaksi	Beberapa variabel dan indikator dalam penelitian ini dapat diadopsi untuk mendukung penentuan variabel ramah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Teknik analisis - Variabel penelitian - <i>Output</i> penelitian

			15. Kebersihan 16. Pembinaan terhadap PKL 17. Legalitas 18. Aglomerasi 19. Modal usaha					
4	Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Puspitasari, D. N. Jurnal Mimbar Hukum UGM, Vol. 22 No.3 Hal. 588-606 (2010).	Bagaimanakan pola penataan PKL yang teratur untuk mewujudkan fungsi tata ruang kota? Bagaimana pola penataan PKL yang dapat menunjang kinerja ekonomi?	1. Pola penataan untuk mewujudkan fungsi ruang 2. Pola penataan untuk menunjang kinerja ekonomi	-	Analisis deskriptif	pola penataan PKL untuk mewujudkan fungsi tata ruang kota di DIY adalah dengan membuat kebijakan mengenai kualifikasi pola penataan PKL sesuai dengan program perencanaan tata ruang kota serta membuat kebijakan pola penataan PKL dengan lebih memperhatikan aspek lingkungan hidup. Adapun pola penataan PKL untuk menunjang kinerja ekonomi di DIY adalah memberikan kesempatan bagi PKL untuk berjualan di sektor informal serta menghimbau kepada pemerintah daerah untuk membuka lapangan pekerjaan dan penerimaan pendapatan daerah dengan pemberlakukan retribusi.	Variabel dalam penelitian ini dapat diadopsi untuk mendukung penentuan variabel pola aktivitas dan pola sebaran PKL	- Teknik analisis - Variabel penelitian - <i>Output</i> penelitian
5	Pemantauan Kebijakan	Tidak efektifnya kegiatan	1. Eksplanasi 2. Akuntansi	-	Analisis deskriptif	Kegiatan pemantauan kebijakan tidak dapat	Faktor-faktor dalam penelitian ini dapat	- Teknik analisis

	<p>Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Garut Kota Oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Garut.</p> <p>Ramadhan, K. M., Sumaryana, A. & Ismanto, S. U. Jurnal Administrasi Negara, Vol. 2 No. 1 Hal. 28-36. ISSN: 2086-1338 (2017).</p>	<p>pemantauan (<i>monitoring</i>) kebijakan penataan PKL</p>	<p>3. Pemeriksaan 4. Kepatuhan</p>			<p>dipandang sebelah mata, dikarenakan pemantauan kebijakan memiliki peran yang vital dalam menilai dan mengawal sejauh mana kebijakan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan koridor tujuan dan sasaran kebijakan tersebut, sehingga Pemantauan Kebijakan tidak dapat hanya dimaknai secara harfiah saja, perlu dilakukan elaborasi yang mendalam, seperti pada aspek kepatuhan, pemeriksaan, akuntansi, dan/atau eksplanasi, karena hasil dari pemantauan kebijakan dapat dijadikan acuan untuk melakukan upaya koreksi/ modifikasi kebijakan.</p>	<p>diadop-kembangkan untuk mendukung indikator kebijakan daerah terhadap daya dukung lahan untuk PKL</p>	<p>- Variabel penelitian - <i>Output</i> penelitian</p>
6	<p>Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif</p>	<p>Terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan penataan PKL di Surabaya</p>	<p>1. Lingkungan 2. Isi kebijakan 3. Implementator dan kelompok target</p>	-	<p>Analisis deskriptif-kualitatif</p>	<p>Pemerintah Kota Surabaya telah menginisiasi pembuatan peraturan kebijakan penataan PKL, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003. Dalam</p>	<p>Faktor-faktor dalam penelitian ini dapat diadop-kembangkan untuk mendukung indikator kebijakan daerah terhadap</p>	<p>- Teknik analisis - Variabel penelitian - <i>Output</i> penelitian</p>

	<p>Kebijakan Deliberatif.</p> <p>Fitriana, Ressa; Auliya, Afifa Ulfa & Widiyarta, Agus. Jurnal GOVERNANSI, Vol. 6 No. 2 Hal. 93-103 (2020)</p>					<p>pembuatan peraturan daerah ini, Pemerintah Kota Surabaya mengikutsertakan masyarakat dengan mengundang perwakilan dari para PKL seperti ketua-ketua paguyuban PKL di tiap wilayah Surabaya. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pembuatan kebijakan penataan PKL terkesan deliberatif, dapat menyatukan kepentingan-kepentingan bersama, dan dapat menyatukan langkah ke depan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan bersama.</p>	<p>daya dukung lahan untuk PKL</p>	
7	<p>Analisis Pengaruh Jarak, Lama Usaha, Modal, dan Jam Kerja Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima Konveksi (Studi Kasus di Kelurahan Purwodinatan</p>	<p>Keberadaan pedagang konveksi di Kelurahan Purwodinatan Kecamatan Semarang Tengah memiliki prospek yang tidak bagus di dalam pengembangannya ditinjau dari</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak antar Pedagang 2. Lama usaha 3. Modal kerja 4. Jam kerja 	-	<p>Analisis kuantitatif</p>	<p>Variabel lama usaha, modal, dan jam kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pedagang kaki lima pedagang konveksi di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang. Sedangkan variabel jarak antar pedagang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap</p>	<p>Variabel dalam penelitian ini dapat diadopsi untuk mendukung penentuan variabel pola aktivitas dan pola sebaran PKL</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Teknik analisis - <i>Output</i> penelitian

	Kota Semarang). Priyandika, A. N. (2015). Skripsi Universitas Diponegoro.	tingkat pendapatan pedagang.				pendapatan pedagang kaki lima pedagang konveksi di Kelurahan Purwodinatan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.		
8	Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung (Prespektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima). Ramadhan, A. <i>Unnes Law Journal</i> , Vol. 4	Mengetahui model zonasi PKL berdasarkan kebijakan daerah	1. Faktor Internal 2. Faktor eksternal	-	Analisis deskriptif	Model zonanisasi dalam penataan PKL sangat berdampak positif terhadap kesejahteraan PKL karena para PKL merasa nyaman saat berjualan dan penghasilan mereka bertambah semenjak penerapan model zonanisasi. Kemudian ada 2 faktor hambatan yang dihadapi oleh pemkot bandung khususnya Satpol PP dalam penataan PKL yaitu faktor internal dimana satpol PP kota bandung kekurangan personil dan kekurangan armada. Sedangkan faktor eksternal yaitu masih ada beberapa PKL yang masih belum memahami perda nomor 4 tahun 2011	Variabel dalam penelitian ini dapat diadap-kembangkan untuk mendukung penentuan <i>IFAS</i> dan <i>EFAS</i> .	- Teknik analisis - Variabel penelitian - <i>Output</i> penelitian

	No. 1 Hal. 56-65 (2015)					tentang penataan dan pembinaan PKL. Pemkot Bandung harus bisa meningkatkan kembali penataan seluruh PKL yang ada di kota Bandung. Kemudian perlunya menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai dan terus memberikan sosialisai kepada seluruh PKL yang ada di kota Bandung tentang perda nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL.		
9	Pengaruh Keberadaan Parkir dan Pedagang Kaki Lima Terhadap Biaya Kemacetan dan Polusi Udara di Jalan Kolonel Sugiono Malang.	Pengaruh keberadaan parkir dan PKL terhadap kemacetan dan polusi udara yang ditimbulkan di Jalan Kolonel Sugiono sangat merugikan pengguna jalan	1. Tempat parkir 2. PKL 3. Biaya 4. Polusi udara	-	Analisis deskriptif-kualitatif	Karakteristik pergerakan Jalan Kolonel Sugiono, mayoritas 43,94% berasal dari kantor, 17,91% berasal dari Kecamatan Klojen, 37,31% menuju ke kantor, 31,34% menuju ke Kecamatan Klojen, 52,25% maksud bekerja dan 20,09% lewat Jalan Kolonel Sugiono pukul 06.00 - 08.00. Tingkat pelayanan Jalan Kolonel Sugiono cenderung	Beberapa variabel dan indikator dalam penelitian ini dapat diadap-kembangkan untuk mendukung penentuan variabel ramah lingkungan	- Teknik analisis - Variabel penelitian - <i>Output</i> penelitian

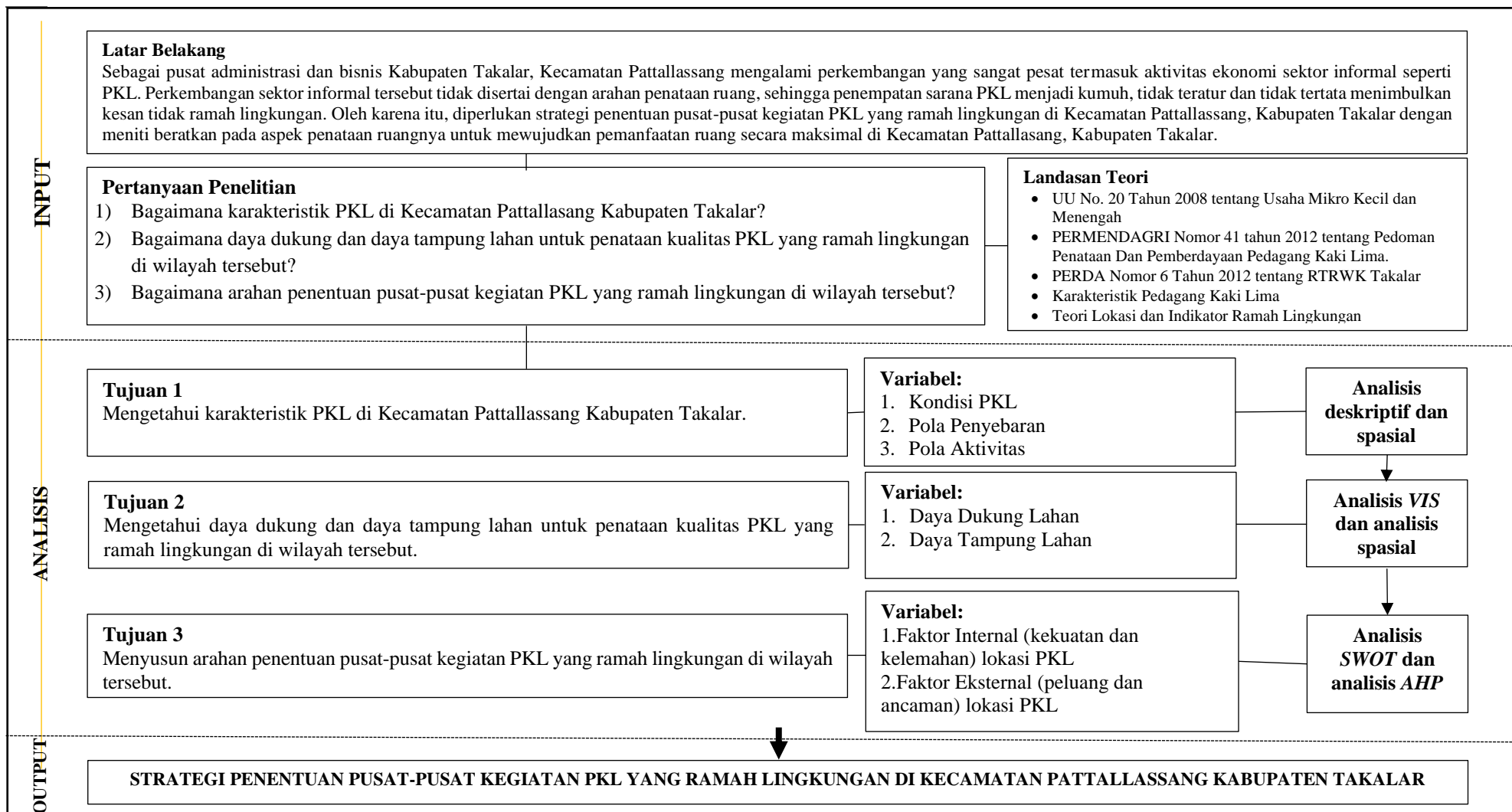
<p>Pertiwi, A. A., Wicaksono, A. & Anggraeni, M. Jurnal Rekayasa Sipil, Vol. 5 No. 3 Hal. 161-167 (2011)</p>				<p>meningkat pada kondisi tanpa keberadaan parkir dan PKL. Dengan kondisi tersebut, tingkat pelayanan pada segmen 1 mengalami peningkatan sebesar 20,65%, pada segmen 2 mengalami peningkatan sebesar 28,95%, dan segmen 3 mengalami peningkatan sebesar 18,01%. Sedangkan biaya kemacetannya mengalami penurunan, yaitu pada segmen 1 sebesar 34%, segmen 2 sebesar 39% dan segmen 3 sebesar 24%. Biaya polusi udara mengalami penurunan pada kondisi tanpa keberadaan parkir dan PKL. Penurunan yang terjadi pada segmen 1 sebesar 25%, segmen 2 antara 31% untuk hari sibuk dan hari biasa serta sebesar 30% untuk hari libur. Pada segmen 3, penurunan antara 16% untuk hari sibuk dan hari libur serta sebesar 17% untuk hari biasa.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

10	<p>Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima di Pantai Penimbangan Kecamatan Buleleng, Kabupa ten Buleleng.</p> <p>Sastrawan, I Wayan., Haris, I. A. & Suwena, K. R. Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol. 5 No. 1 Hal. - (2015)</p>	<p>(1) faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pemilihan lokasi usaha pedagang kaki lima (PKL), (2) faktor apa yang paling dominan mempengaruhi pemilihan lokasi usaha PKL, (3) masalah yang di hadapi PKL di Pantai Penimbangan dan bagaimana solusinya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aksesibilitas 2. Visibilitas 3. Lalulintas 4. Tempat parkir 5. Ekspansi 6. Lingkungan 7. Persaingan 8. Peraturan pemerintah 	-	<p>Analisis deskriptif-kualitatif</p>	<p>(1) faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi usaha PKL adalah aksesibilitas, visibilitas, lalulintas (<i>traffic</i>), tempat parkir, ekspansi, lingkungan, persaingan, peraturan pemerintah. (2) faktor yang paling dominan mempengaruhi pemilihan lokasi usaha PKL adalah faktor aksesibilitas sebesar 56,331%. (3) masalah yang di hadapi PKL adalah kepastian penempatan lokasi, retribusi, permodalan, tingkat kehadiran konsumen bersifat <i>incidental</i> dan lingkungan yg kotor. Solusi dari masalah tersebut adalah PKL sudah memiliki ijin usaha yang pasti, jumlah retribusi disesuaikan dengan pendapatan PKL, adanya fasilitas bagi PKL dalam memperoleh modal dari bank dan Peningkatan pelayan dan disediakannya petugas kebersihan.</p>	<p>Variabel dalam penelitian ini dapat diadop-kembangkan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung lahan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Teknik analisis - Variabel penelitian - <i>Output</i> penelitian
----	---	---	---	---	---------------------------------------	--	--	--

2.4 Kerangka Pikir Penelitian

Bagian kerangka pikir penelitian menggambarkan konsep penelitian yang menunjukkan hubungan antara variabel satu dengan lainnya secara sistematis.

Perhatikan Gambar 2.4 berikut ini.



Gambar 2.4 Kerangka Pikir Penelitian